

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan uraian yang berisi teori, temuan, dan bahan yang digunakan untuk penelitian sebagai acuan kegiatan penelitian. Dimana literature review berisi ulasan, rangkuman, maupun pemikiran penulis dari sumber pustaka yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

No	Nama Penulis dan Judul	Teori / Konsep	Metode Penelitian	Temuan
1.	Sugiyarto, Rabith Jihan Amaruli. Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. <i>Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 7, Nomor 1, Maret 2018, pp. 45-52.</i>	Kearifan lokal adalah seperangkat pengetahuan dan praktik-praktik baik yang berasal dari generasi-generasi sebelumnya maupun dari pengalaman berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya milik suatu komunitas di suatu tempat, yang digunakan untuk menyelesaikan baik dan benar berbagai	Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui observasi secara langsung dan <i>indepth interview</i> dengan pihakpihak terkait penelitian. Dengan menganalisa menggunakan <i>Strength, Weakness, Opportunity and Threats (SWOT)</i> . Analisis ini digunakan untuk menganalisis	Strategi peningkatan wisata budaya lokal yang dirumuskan berdasarkan <i>strength, weakness, opportunity</i> dan <i>threats</i> budaya lokal meliputi: (1) meningkatkan potensi budaya lokal melalui kerjasama dengan Pemerintah maupun pihak swasta; (2) meningkatkan potensi budaya lokal yang didukung dengan sentra kerajinan budaya dan peranan masyarakat lokal dan

		<p>persoalan dan atau kesulitan yang dihadapi. Kearifan lokal berasal dari nilai-nilai adat istiadat, keagamaan dan budaya lokal yang secara alami terbentuk dalam suatu kelompok masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Vitasurya, 2016).</p>	<p>potensi dan permasalahan pada pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal pada masing-masing lokasi penelitian termasuk potensi dan permasalahan internal maupun eksternal.</p>	<p>kelompok sadar wisata; (3) memperbaiki pemasaran destinasi wisata budaya melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait, pemerintah dan dukungan masyarakat lokal; (4) memperbaiki infrastruktur pendukung pada lokasi pariwisata budaya; (5) meningkatkan kerjasama kepariwisataan budaya antar daerah/kabupaten khususnya daerah yang berlokasi di wilayah pesisir pantai utara; (6) memperbaiki tata kelola pada manajemen wisata budaya; (7) perbaikan</p>
--	--	---	--	---

				<p>kualitas SDM sektor pariwisata khususnya pariwisata budaya dengan pelatihan dan pendampingan;</p> <p>(8) mempertahankan keunikan pariwisata budaya sesuai dengan kearifan lokal yang didukung oleh produk kerajinan lokal; dan</p> <p>(9) mitigasi wisata budaya yang berlokasi di pesisir pantai.</p>
2.	<p>Nur Adyla S, Nurlaela.</p> <p>Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tammangalle Polewali Mandar. Jurnal Plano Madani volume 7 nomor 2</p>	<p>Pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal sejalan dengan tiga prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dikembangkan oleh World Tourism Organization Ga(WTO) yaitu kelangsungan ekologis, kelangsungan sosial</p>	<p>Metode analisa yaitu analisis kualitatif deskriptif yang digunakan dalam strategi pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di Desa Tammangalle adalah metode analisa deskriptif eksploratif untuk memaparkan karakteristik dan</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Desa Tammangalle dapat dikembangkan menjadi desa wisata yang berbasis kearifan lokal dengan potensi wisata yaitu situs budaya, home industry lipa' saqbe, makanan khas Mandar yaitu golla kambing, kassippi,</p>

	<p>oktober 2018, 132-141.</p>	<p>budaya, dan kelangsungan ekonomi, baik untuk generasi sekarang maupun generasi akan datang (Suwena, 2010), sehingga perlunya pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal di Desa Tammangalle untuk menciptakan desa wisata yang berkelanjutan, dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal, dan juga untuk menjaga, mempertahankan serta melestarikan warisan.</p>	<p>potensi wisata di Desa Tammangalle, kondisi realitas di wilayah penelitian yang diamati sesuai dengan fenomena yang ada serta disusun berdasarkan kajian ilmu pengetahuan, dan akhirnya merumuskan strategi pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal.</p>	<p>dan gogos, ritual adat, sifat masyarakat desa yang khas dan kental yaitu sifat yang baik, ramah, tidak kasar, suka menolong dan menerima orang baru, keindahan alam pantai, dan hasil perikanan dan perkebunan desa.</p>
<p>3.</p>	<p>Maria C.B Manterio. Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis</p>	<p>Chambers (1983) menyampaikan konsep perangkat</p>	<p>Analisis data penelitian dibedakan menjadi analisis deskriptif kuantitatif dan analisis desa</p>	<p>Berdasarkan potensi wilayah baik potensi fisik maupun non fisik serta kegiatan desa wisata</p>

<p>Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Rote Nusa Tenggara Timur. Jurnal Bisnis Dan Manajeme Volume 2 Nomor 2 Desember 2016.</p>	<p>deprivasi (<i>concept ofdeprivation trap</i>) yang menganalisis penyebab kemiskinan sebagai hubungan sebab akibat yang saling kait-mengkait baik lingkaran setan (<i>vicious circle</i>) antara ketidakberdayaan (<i>powerless</i>), kemiskinan (<i>poverty</i>), kerapuhan (<i>vulnerability</i>), kelemahan (<i>physical weakness</i>), dan keterasingan (<i>solution</i>). Memisahkan mata rantai merupakan upaya yang dianggap dapat membebaskan masyarakat miskin dari ketidakberdayaan</p>	<p>kriptif kualitatif. Analisis data bersifat deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data primer dan data sekunder berkaitan dengan variabel umur, pendidikan, mata pencaharian, penguasaan lahan, pendapatan, investasi terkait pariwisata, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan pertanian, kegiatan produktif, dan potensi desa wisata. Dalam hal ini digunakan tabel frekuensi untuk menjelaskan mengenai pola dan variabel.</p>	<p>dan kearifan lokal yang ada di daerah penelitian maka dapat dibuat 3 (tiga) model pengembangan desa wisata, yaitu: 1. Desa Wisata Feapopi dijadikan alternatif model pengembangan desa wisata alam dan budaya. 2. Desa Wisata Kuli dijadikan alternatif model pengembangan desa wisata alam 3. Desa Wisata Sotimori dijadikan alternatif model pengembangan desa wisata alam dan budaya.</p>
---	---	--	---

		sehingga menumbuhkan kekuatan dan memiliki kemandirian.		
4.	Hastuti, Suhardi Purwantara, Nurul Khotimah, Jurusan Pendidikan Geographi, FIS UNY. Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Lereng Merapi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.	Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendekatan dan penyadaran masyarakat diperlukan agar mereka dapat menggunakan dan memiliki akses kontrol dala pengembangan desa wisata. Kegiatan pariwisata dengan memanfaatkan sumberdaya setempat mulai dikembangkan mendasarkan pada tujuan ekonomi berkelanjutan, mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.	Analisis data penelitian ini meliputi analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data primer dan sekunder berkaitan dengan variabel umur, pendidikan, mata pencaharian, penguasaan lahan, pendapatan, investasi terkait pariwisata, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan pertanian, kegiatan produktif,	Dari uraian pada hasil penelitian dan pembahasan maka daerah penelitian dapat dibuat 3 (tiga) model pengembnagan desa wisata, Yaitu: 1. Desa Wisata Pentingsari sebagai alternatif model pengembangan desa wisata alam. 2. Desa Wisata Srowolan sebagai alternatif model pengembangan desa wisata budaya. 3. Desa Wisata Brayut sebagai alternatif Model Pengembangan Desa Wisata alam dan Budaya.

			dan potensi desa wisata.	
5.	Vincentia Reni Vitasurya. <i>Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism, Case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. Procedia - Social and Behavioral Sciences</i> 216 (2016) 97 – 108.	Kearifan lokal adalah hal positif perilaku manusia ketika berinteraksi dengan alam dan lingkungan lokalnya yang berawal dari nilainya adat istiadat agama, nasihat nenek moyang atau budaya lokal, secara alami dibangun dalam komunitas untuk beradaptasi dengan budaya setempat lingkungan budaya.	Penelitian ini menggunakan partisipasi masyarakat untuk memperoleh data berdasarkan komunitas motivasi. Pengamatan dengan pemetaan dan wawancara dilakukan untuk mengukur aspek konservasi lingkungan.	Dari hasil temuan penelitian ini diadapati bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengemasan variasi atraksi, pengembangan infrastruktur dan fasilitas, memiliki bagian dalam kelompok penjaga, serta pengelolaan limbah dari kegiatan pariwisata.
6.	Farahdilla Kutsiyah. Menumbuhkembangkan Destinasi Desa Wisata Dan Ekonomi	Penelitian ini menggunakan konsep Desa Wisata, pendekatan ekonomi kreatif dan Resource Based View dengan	Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>resource based view</i> dengan kerangka	Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi budaya sapi sonok memiliki kekuatan yang bersifat strategis. Budaya ini berjaln

	<p>Kreatif Berbasis Budaya Sapi Sonok Di Pulau Madura. Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 3, Nomor 3 (2019): 586-599.</p>	<p>kerangka VRIO (<i>valuable, rare, costly to imitate</i> dan <i>exploited by institution</i>).</p>	<p>VRIO, yang mencakup empat parameter kunci yaitu bernilai, langkah, sulit untuk diimitasi dan sudah dikelola oleh insititusi.</p>	<p>kelindan dengan perbaikan performan ternak, peningkatan pendapatan.</p>
7.	<p>Neneng Komariah, Encang Saepudin, Pawit M. Yusup. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal. Jurnal Pariwisata Pesona Volume 03 No 2, Desember</p>	<p>Konsep dan teori tentang kriteria desa wisata akan dijadikan dasar dalam analisis dan pembahasan data penelitian. Konteks tersebut terkait dengan kenyataan yang terkait dengan produk dan daya tarik wisata, kesiapan dan penerimaan masyarakat,</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan pendekatan ini dengan pertimbangan bahwa sifat data penelitian mampu mempertahankan keutuhan dari obyek.</p>	<p>Terdapat tiga prinsip pokok keorganisasian yaitu keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, manajemen organisasi dilaksanakan secara demokratis, dan kemandirian. Kriteria desa wisata meliputi daya tarik, aksesibilitas, fasilitas umum dan fasilitas wisata,</p>

	2018: p 158-174.	pengembangan sumberdaya manusia.		pemberdayaan masyarakat, dan pemasaran ataupun promosi.
--	------------------	----------------------------------	--	---

Tabel 1. Hasil Penelitian Terdahulu

2.2 Tata Kelola Desa Wisata

Arti daerah Pemerintahan Desa, terlebih dahulu harus dapat dibedakan antara istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah. Dengan demikian Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintahan Desa (Himawan Pambudi, 2001:50). Maria Eni Surasih (2002:23) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Fransisco Antonio Dos Anjos dan James Kennell Tatakelola yang efektif adalah kondisi mendasar untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. Tatakelola desa wisata mampu mendorong program percepatan desa wisata, di mana masyarakat berpartisipasi dengan aktif dalam mengembangkan desa wisata akan mampu menekan terjadinya peningkatan pendapatan perekonomian. Dalam tatakelola pariwisata telah mengidentifikasi pergeseran dari pemerintah untuk tatakelola dalam kebijakan pariwisata. Peran organisasi manajemen Melalui analisis dokument kebijakan pariwisata. Seperti halnya masyarakat, perpektif kunci lain yang terlihat jelas dalam koleksi ini adalah dari institusi, keduanya dalam hal bagaimana lembaga tatakelola utama untuk fungsi pariwisata di bidang pariwisata berkelanjutan pengembangan, dan juga hal mengkritik tindakan khusus yang di ambil oleh lembaga-lembaga.

Pemerintahan adalah konsep yang harus di pahami sebagai proses yang melibatkan koordinasi, kolaborasi dan kerja sama para pemangku kepentingan, untuk memastikan efek pengembangan sosial dan lingkungan pariwisata dalam ekonomi lokal. terkait kebijakan pariwisata lokal, efektivitas tatakelola pariwisata lokal, memperhatikan manajemen pariwisata, organisai lokal. Maka dari tatakelola pariwisata lokal juga melibatkan jaringan tatakelola masyarakat serta adanya dukungan dari pemerintah dalam membuat kebijakan agar menjadi efektif, akuntabilitas, transparansi, efisiensi. Penilaian baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungan dengan unsur prinsip-prinsip *good governance*. Kunci utama memahami indikator Tatakelola Desa Wisata yang baik menurut Fransisco Antonio Dos Anjos dan James Kennell yaitu:

a. Kebijakan Pariwisata Lokal.

Yaitu mereka pemerintah yang membuat keputusan serta merencanakan membuat masalah seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, komunikasi, berbagai pengetahuan, efisiensi dan kesetaraan.

b. Manajemen Pariwisata

Yaitu pariwisata juga mengharuskan pengembangannya disertai dengan perencanaan dan efisiensi proses manajemen yang didasarkan pada prinsi-prinsip dasar keberlanjutan dan terkait Pengelolaan Sumber dayanya.

c. Organisasi atau Lembaga

Yaitu Seperti halnya masyarakat, kelompok-kelompok organisasi yang berperan dalam membangun daerahnya. Perpektif kunci lain yang terlihat jelas dalam koleksi ini adalah dari institusi, keduanya dalam hal bagaimana lembaga tatakelola utama untuk fungsi pariwisata di bidang pariwisata berkelanjutan melibatkan lembaga-lembaga. Struktur kelembagaan adalah kerangka formal dan informal yang menciptakan organisasi dan membentuk otonomi, otoritas, dan disiplin organisasi.

d. Efektifitas Pariwisata Lokal

Yaitu merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap kegiatan maupun program dan mampu mengelola sarana dan prasarana guna menunjang kemajuan.

Menurut Alberto Amore. C dan Michael Hall dalam hal ini untuk menjelaskan dan meninjau pentingnya tatakelola untuk riset pariwisata dikaji dengan beberapa implikasi yang potensial. Tatakelola adalah secara bersamaan baik pendapat kritis untuk studi tatakelola dan cara berpikir bagaimana disusun dan diterapkan. Sebagai hasilnya, mencerminkan gagasan bahwa kebijakan adalah refleksi teori (Pierre & Peters, 2000; Stoker 1998). Dalam kasus tatakelola seperti itu, teori biasanya mencakup kedua teori peran negara dan tindakan yang tepat dari pemerintah dan teori-teori interaksi sosial dan perubahan dalam sistem sosial. Setiap mode intervensi kebijakan memiliki asumsi tentang peran negara dan bagaimana masyarakat dan organisasi ini untuk saling memahami tatakelola pariwisata dan pembuatan kebijakan tidak dapat dilebih-lebihkan.

Tatakelola pariwisata sebagai subjek studi pariwisata, namun dengan demikian, tema-tema utama lainnya sehubungan dengan tatakelola pariwisata dapat diidentifikasi. Moscardo (2008,2011a,2011b), menyoroti pentingnya pengetahuan dan pemberdayaan dalam melakukan pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan jaringan untuk kemajuan pariwisata terkait tatakelola yang dianggap penting terhadap manajemen dan pemasaran destinasi serta rganisasi, dan inovasi regional dan sektoral dalam sistem produk. Adopsi konsep tatakelola telah memiliki pengaruh besar pada tujuan pariwisata terhadap perencanaan dan kebijakan (Hall, 2011a).

Pemahaman istilah desa wisata cukup beragam, Safitri (2006:79) menyebutkan bahwa desa wisata di definisikan sebagai bentuk integritas antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara tradisi yang berlaku. Sehingga, dalam menetapkan terbentuknya desa wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Akseibilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.

- b. Memiliki obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
- c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang kedesaanya.
- d. Keamanan di desa tersebut terjamin.
- e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.
- f. Beriklim sejuk atau dingin.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jadi Pemerintah Desa merupakan organisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri atas: Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa, Unsur pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa, yang meliputi sekretariat desa, kewilayahan dan pelaksana teknis).

Peraturan hukum yang mengatur Tatakelola Pemerintahan Desa, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang”; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Berdasarkan pada pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya dalam mengelola desa wisata harus memperhatikan terkait Tatakelola Pariwisata yang memperhatikan unsur-unsur didalamnya yaitu memperhatikan sebuah kebijakan pariwisata lokal, manajemen pariwisata, organisasi atau lembaga yang

berperan sebagai jarigan untuk berkontribusi didalamnya. Inilah yang menjadi acuan guna meningkatkan daerah tersebut yang memiliki potensi wisata entah alam, budaya, dan kerajinannya.

Maka dari itu dalam konteks penelitian ini, Tata kelola pariwisata didalam beberapa teori tersebut dan segala bentuk indikator didalamnya mencerminkan hal-hal yang memenuhi beberapa kajian guna menyelaraskan penelitian jika dilihat dari perpektif teori Tatakelola Desa Wisata. Maka ditegaskan dalam penelitian ini untuk menjadi acuannya menggunakan Teori Fransisco Antonio Dos Anjos dan James Kennell.

2.2.1 Pemerintahan Desa

Salah satu kehasan bangsa indonesia terletak pada keanegaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian dan sebagainya. Itu pulalah sebabnya, dalam kenyataan terdapat keanegaragaman dan kesatuan masyarakat yang terendah. Kesatuan masyarakat yang dimaksud adalah, umpannya Desa di jawa dan madura, Gampong di aceh, Huta di batak, Nagari di minangkabau, Dusun atau Marga di Sumatra Selatan, Suku di beberapa daerah Kalimantan dan sebagainya.

Kata Desa berasal dari kata sansekerta “Deshi” yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut *self governing community*. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial belanda.

Pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan Negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap masyarakat, melakukan pengawasan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan yang baik didalam lingkungan Negara maupun dengan negara lain. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh badan pemerintahan desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.

Berbicara mengenai Pemerintahan Daerah, dalam perspektif desentralisasi sebagai penyerahan wewenang atau urusan Pemerintahan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri atau sering juga sebagai disebut devolusi atau desentralisasi politik. Dengan demikian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi menjadi tanggungjawab daerah otonom. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi Pemerintahan hanya sampai pada tingkat Kecamatan. Hal ini mendudukan posisi Kelurahan yang sebelumnya sebagai perangkat daerah yang sama-sama bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali Kota, justru statusnya dicabut dan kedudukannya tidak terpisahkan dari perangkat Kecamatan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, Pemerintahan Kelurahan yang sebelumnya sebagai perangkat daerah memiliki kewenangan atributif berubah sifatnya sebagai delegatif berdasarkan tindakan Camat dalam melimpahkan kewenangan Pemerintahan di level unit kerjanya. Pergeseran kewenangan Lurah dapat dilihat dalam pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibantu Perangkat daerah, selanjutnya menurut Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota terdiri a) Sekretariat Daerah, b) Sekretariat DPRD, c) Inspektorat, d) Dinas, e) Badan, dan f) Kecamatan. Posisi Kelurahan tidak lagi terlihat sebagai Perangkat Daerah, tugas, fungsi serta kewenangan Lurah diberikan oleh Kecamatan sebagai perangkat daerah terendah di

Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2 Februari 2017 66 Pemerintahan. Kondisi ini tentu berbeda pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana Camat dan Lurah memiliki wewenang penuh dan otonom dalam Penyelenggaraan pengambilan keputusan politik di wilayahnya. Jadi, pada masa itu secara hukum posisi Camat dan Lurah sejajar dengan posisi para Kepala Dinas Daerah.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa yang ada di setiap pedesaan merupakan lembaga perpenjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan

pemerintahan. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Adapun struktur organisasi pemerintahan desa secara terperinci adalah:

a. Kepala Desa (Kades)

Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam Pemerintahan Desa. Bersama sama perangkat desa lainnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi oleh pegawai Negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggaraan dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembagunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan Pemerintahan umum termasuk pimpinan ketentramaman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Lembaga Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sebagai wadah permusyawaratan atau pengambilan mandat dari pemuka masyarakat yang ada di Desa mempunyai tempat untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Serta berfungsi untuk meyampaikan bahan masukan bagi pengambilan keputusan Kepala Desa dan membina hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di singkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan yang berfungsi mengayomi, melegislasi, mengawasi, dan menampung aspirasi masyarakat.

c. Sekretaris Desa (Sekdes)

Sekretaris Desa diisi Pegawai Negeri Sipil, yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan

kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa. Kepala kepala urusan (kaur), apabila Kepala Desa berhalangan maka Sekretaris Desa menjalankan tugas wewenang Kepala Desa sehari-hari.

d. Kepala Urusan (Kaur)

Kepala Urusan sebagai pembantu Sekretaris Desa di dalam memberikan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing fungsi kepala urusan adalah melaksanakan kegiatan pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Kepala Dusun (Kasun)

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa dalam desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing fungsi kepala urusan adalah melaksanakan kegiatan pencatatan, pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3 Konsep Desa Wisata

Konsep Desa Wisata berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Bukan hanya untuk memperkaya obyek dan daya tarik wisata di sebuah desa wisata, tetapi beberapa fasilitas, konsep dan kegiatan harus dapat dibangun baik. Menurut Safitri (2006), konsep dibangunnya desa wisata sebagai berikut:

- a. *Eco lodge*: renovasi homestay agar memenuhi persyaratan akomodasi wisatawan, atau membangun guest house berupa, bamboo house, tradisional house, log house, dan lain sebagainya.
- b. *Eco recreation*: kegiatan pertanian, pertunjukan kesenian lokal, memancing ikan di kolam, jalan-jalan di desa dan lain sebagainya.
- c. *Eco Education*: mendidik wisatawan mengenai pendidikan lingkungan dan mengenalkan flora dan fauna yang di desa bersangkutan.
- d. *Eco research*: meneliti flora dan fauna yang ada di desa, serta mengembangkan produk yang dihasilkan di desa, serta meneliti keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat di desa tersebut dan sebagainya.

- e. *Eco energy*: membangun sumber energi tenaga surya atau tenaga air untuk Eco lodge.
- f. *Eco development*: menanam jenis jenis pohon yang buahnya untuk makanan burung atau binatang liar, tanaman hias, tanaman obat, agar bertambah populasinya.
- g. *Eco promotion*: promosi lewat media cetak atau elektronik, dengan mengundang media massa.

Dalam definisi lain, Akbar (2018) berpendapat bahwa pengelolaan desa wisata objek wisata tidak hanya terbatas pada penempatannya sebagai desa wisata. Penetapan suatu desa sebagai desa wisata setidaknya didasarkan atas beberapa komponen potensial yang mendukung, yaitu:

- a. Adanya atraksi atau daya tarik yang khas dari desa itu sendiri.
- b. Adanya fasilitas fasilitas dan akomodasi pariwisata seperti fasilitas penginapan, fasilitas makan dan minum, pusat kuliner atau cenderamata, pusat pengunjung.
- c. Adanya aktifitas wisata seperti menikmati pemandangan dan lain lain. Adanya pengembangan umum sebagai upaya untuk menciptakan daerah tujuan wisata yang memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan, diantaranya: pembagian zona atau area, pengelolaan pengunjung dan pelayanan komunikasi.

2.4 Komponen Desa Wisata

Komponen-komponen desa wisata menurut atmoko (2014) adalah:

- a. Atraksi dan kegiatan wisata, atraksi wisata dapat berupa seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, hiburan, jasa dan lain-lain yang merupakan daya tarik wisata. Atraksi ini memberikan ciri khas daerah tersebut yang mendasari minat wisatawan untuk berkunjung ketempat tersebut. Kegiatan wisata adalah apa yang dikerjakan wisatawan atau motivasi wistawan datang kedistinasi yaitu keberadaan mereka disana dalam waktu setengah hari sampai berminggu minggu.

- b. Akomodasi, akomodasi pada desa wisata yaitu sebagai dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tinggal penduduk.
- c. Unsur institusi atau kelembagaan dan SDM, dalam pengembangan desa wisata lembaga yang mengelola harus memiliki kemampuan yang handal.
- d. Fasilitas pendukung wisata lainnya, pengembangan, pengelolaan desa wisata harus memiliki fasilitas-fasilitas pendukung seperti sarana komunikasi.
- e. Infrastruktur lainnya, infrastruktur lainnya juga sangat penting disiapkan dalam pengembangan desa wisata.
- f. Transportasi, sangat penting untuk memperlancar akses tamu dari luar daerah untuk melakukan perjalanan ketempat wisata.
- g. Sumber daya alam lingkungan alam dan sosial budaya.
- h. Masyarakat, dukungan masyarakat sangat besar perannya seperti menjaga kebersihan lingkungan, keamanan keramah tamahan.
- i. Pasar domestik dan mancanegara.

Dalam mendefinisikan komponen-komponen desa wisata Zakaria (2014), juga memiliki pemahaman komponen desa wisata yaitu keunikan dapat dilihat dari tempat desa wisata tersebut yang memiliki ciri khas tertentu untuk menarik wisatawan lokal maupun wisata asing, keaslian desa wisata juga dapat menambah nilai tambah untuk tempatnya tanpa mengubah kealamian alam itu sendiri, sifat khas yang dimiliki desa wisata seperti budaya budaya lokal yang ada di daerah tersebut agar desa mempunyai kearifan lokal yang dapat di jadikan sebagai daya tarik sendiri. Serta letaknya berdekatan dengan-daerah alamnya yang luar biasa, untuk mengelola desa wisata juga butuh kerjasama serta mengaitkan dengan kelompok-kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung. Dalam hal ini juga desa wisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di sekitarnya serit memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.

Desa wisata harus memiliki potensi pariwisata, aksesibilitas dan infrastruktur pendukung yang dikelola dengan baik, penjelasan kompone desa wisata cukup beragam seperti yang dijelaskan Zakaria (2014) yakni, Desa Wisata harus memiliki potensi pariwisatanya, seni, dan budaya khas daerah setempat. Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatihan bagi masyarakat, serta pelaku pariwisata, didalam desa wisata juga harus menjaga seni dan budaya yang ada. Ada beberapa hal yang penting untuk disiapkan di dalam membangun desa wisata, seperti adanya masyarakat yang peduli akan keberadaan wisata tersebut sehingga muncullah system adat-istiadat dan norma yang menjadi daya dari dukung sumber daya alam di desa wisata.

Hal ini sesuai yang di sampaikan oleh Zakaria (2014) untuk komponen desa wisata setidaknya perlu dipersiapkan empat hal yang pertama, adanya campur tangan dari partisipasi masyarakat lokal karena peran merekalah yang utama dalam mengelola desanya sendiri. Kedua sistem norma setempat atau aturan yang berlaku di desa. Ketiga, sistem adat setempat merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena dalam mengelola daerah atau tempat harus memperhatikan persetujuan atau mengikuti aturan adat desa. Keempat, memperhatikan budaya setempat yang di junjung tinggi oleh masyarakat desa.

2.5 Kriteria Desa Wisata

Berdasarkan dari tinjauan mengenai desa wisata dalam menentukan kriteria sebuah desa menjadi desa wisata menurut atmoko (2014) adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas (sebagai atraksi wisata), baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan.
- b. Memiliki dukungan dan kesiapan fasilitas pendukung kepariwisataan terkait dengan kegiatan wisata pedesaan, yang antara lain dapat berupa: akomodasi penginapan, ruang atraksi, masyarakat dengan wisatawan atau tamu, serta memiliki fasilitas pendukung lainnya.

- c. Memiliki atraksi pasar (wisatawan) yang tercermin dari kunjungan wisatawan kelokasi desa tersebut.
- d. Adanya dukungan, inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat terhadap pengembangan desa tersebut terkait dengan kegiatan kepariwisataan sebagai desa wisata.

Masing-masing kriteria digunakan untuk melihat karakteristik utama suatu desa untuk kemudian apakah suatu desa akan menjadi desa wisata dengan tipe berheti sejenis, tipe on day trip atau tipe tinggal inap. Jadi menurut definisi diatas kriteria desa wisata mencakup alam budaya yang memiliki jarak tempuh dari kawasan wisata dengan wisata lainnya, dalam hal ini harus di dukung dengan berbagai infrastruktur yang baik teruma jalan akses menuju ketempat wisata wisata agar lebih mudah di jangkau oleh pelancong atau pejalan yang ingin berkunjung, fasilitas yang lain juga harus di perhatikan dengan baik seperti fasilitas listrik, air bersih, musholla, dan lain sebagainya, kemudian yang tidak kalah pentingnya adanya dukungan dari pemertintah pusat, pemerintah daerah serta peran masyarakat untuk mengembangkan desa wisata yang berbasis kearifan lokal.

2.6 *Kearifan Lokal (Local Wisdom)*

2.6.1 *Pemahaman Kearifan Lokal (Local Wisdom)*

Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas itu berada. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah jawaban kearifan terhadap situasi geografis politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal seperti yang dikatakan oleh Wuryani (2014:04), *Local Wisdom* (Kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Wuryani, 2014).

Kearifan lokal merupakan hasil budaya kebijaksanaan lokal dan kecendekiaan lokal yang didalamnya mengandung nilai-nilai peradaban dengan tujuan untuk pelestarian lingkungan dan demi untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam masyarakat

yang tinggal di kawasan wisata, kearifan lokal diwujudkan dalam bentuk mitos, legenda, adat, tradisi, kepercayaan, relief relief yang di perhatikan di dinding candi, dan organisasi organisasi sosial. Menurut Wuryani (2014), bumi Nusantara sarat dengan nilai-nilai peradaban kearifan lokal yang dapat mendukung terbentuknya karakter bangsa yang berbudi luhur sehingga secara segera kesejahteraan dalam masyarakat terwujud.

Tamaratika (2017) mendefinisikan kearifan lokal adalah seperangkat pengetahuan beserta nilai dan norma tertentu yang bersumber dari hasil adaptasi serta pengalaman hidup suatu kelompok masyarakat di suatu lokasi tertentu yang kemudian memberikan suatu bentuk pola pemikiran dan tindakan tertentu sebagai cara untuk hidup selaras dengan lingkungannya, dengan sesamanya serta terhadap lingkungan lingkungan mereka sendiri.

Sedangkan Lumajang (2016) mengungkapkan kearifan lokal sebagai warisan nenek moyang dalam tata nilai kehidupan menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat. Kearifan lokal adalah cara dan praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari pemahaman mendalam terhadap lingkungan setempat terbentuk secara turun temurun.

Sedangkan Tamaratika (2017) menjelaskan bahwa kearifan lokal dapat berbentuk tangible (tekstual, arsitektual, karya seni tradisonal) dan intangible (sistem nilai, kidung, petuah), dan dari segi jenis kearifan lokal terdiri atas tata kelola, sistem nilai, prosedur, dan ketentuan khusus seperti kawasan sensitif dan kawasan bangunan suci.

Ridwan (2016) menjelaskan pengelolaan kawasan wisata ditujukan untuk melindungi tata nilai area yang dikembangkan. Sarana akomodasi, SDM, produk jasa, kepemimpinan, produk dan kemasan, secara hati-hati dikembangkan dengan mengadopsi tata nilai asli serta melibatkan penduduk lokal. Tata nilai atau kearifan yang terlindung akan menjadi sumber inspirasi dan rumusan best practice bagi terselenggarakannya organisasi itu sendiri maupun distribusi manfaat. Selain itu juga menjelaskan terkait kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal untuk bertahan hidup

dalam suatu lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekpresikan didalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

2.6.2 *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Pariwisata*

Kerifan lokal dalam pariwisata, terdapat pendekatan yang dapat digunakan yang berbasis kearifan lokal yang di jelaskan oleh Tamaratika (2017) yakni, Pendekatan Participatory Planning, dengan melibatkan seluruh unsur praktis baik pemerintah serta msyarakat sekitar yang berperan utama dalam mengelola daerahnya dan merencanakan pengembangan keberlanjutan kawasan wisata. Dalam mengelola desa wisata juga harus melakukan pendekatan terhadap potensi yang ada dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang mampu mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mengembangkan kemampuan pribadi maupun kelompok.

Pendekatan kewilayahan, dengan melihat faktor keterkaitan wilayah sekitar untuk melihat potensi dan direncanakan secara seimbang. Pendekatan optimalisasi potensi yang dapat diintegrasikan, dengan memperhatikan potensi budaya dan pariwisata yang dapat diintegrasikan. Menurut Tamaratika (2017), untuk mengembangkan pariwisata alam yang di padukan dengan unsur kearifan lokal dilaukan dengan beberapa tahap pengembangan yaitu: Mengidentifikasi sumber daya, menyelidiki potensi potensi, membuat rencana program dan penatalaksanaannya, mengembangkan produk, melaukan marketing dan komunikasi, serta penelitian.

Kearifan lokal dan keunggulan lokal menurut suryono (2010:14) ialah kebijaksanaan manusia yang berdasarkan filosofi nilai nilai, etika, cara cara dan perilaku yang telah berlaku sejak dahulu. Betuk bentuk kearifan lokal yang ada didalam masyarakat ialah nilai nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, serta aturan aturan khusus yang berlaku di masyarakat dengan fungsi yang bermacam pula. Beberapa fungsi kearifan lokal, antara lain:

1. Sebagai bentuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam.
2. Pengembangan sumber daya manusia.
3. Digunakan untuk megembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

4. Sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.
5. Mempunyai makna sosial, contohnya upacara yang dilaksanakan pada tahap menanam padi.
6. Mempunyai makna etika dan moral dan bermakna politik atau hubungan kekuasaan.

Daya tarik wisata budaya merupakan salah satu nilai tunggal yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Menurut Sunaryo (2013:26), daya tarik wisata budaya ialah daya tarik wisata yang pengembangannya berdasarkan pada hasil karya dan hasil cipta manusia, baik itu berupa peninggalan budaya maupun nilai budaya yang masih hidup dalam kehidupan suatu masyarakat. Contoh daya tarik wisata budaya ialah upacara atau ritual, adat istiadat, seni pertunjukkan dan lain sebagainya.

Karakteristik wisata budaya dari suatu daerah memiliki peran yang sangat menentukan dalam menyerap dampak dari destinasi pariwisata suatu daerah. Wisata budaya yang memiliki karakteristik yang lain daripada yang lain merupakan nilai unggul yang dapat dijadikan kekuatan dalam menarik wisatawan lebih banyak lagi. Ada beberapa karakteristik unggul dari industri pariwisata yang membuat industri ini mampu berperan sebagai keunggulan kompetitif bagi pembangunan daerah, yakni:

1. Sektor pariwisata ialah salah satu industri yang memiliki keterkaitan nilai (*multiplier effects*) yang sangat panjang dan mampu menjalin sinergi pertumbuhan dengan berbagai usaha mikro termasuk kegiatan *home industry*.
2. Usaha yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata dapat menyerap tenaga kerja sumber daya setempat (*local resources based*) dan yang paling penting berbahan baku yang relatif tidak pernah habis atau terbaharui (*renewable resources*).
3. Tidak adanya *over supply* dalam industri pariwisata karena mempunyai karakteristik produk yang khas dan relatif tidak dipengaruhi oleh adanya situasi resesi atau krisis ekonomi pada suatu negara.

Kemajuan teknologi, serta pengaruh globalisasi saat ini sangat mempengaruhi seluruh sendi kehidupan masyarakat dunia. Giddens (1994:5) menjelaskan globalisasi merupakan seperangkat proses yang kompleks yang sering bertentangan dan terkadang kontradiktif. Globalisasi tidak hanya mempengaruhi perubahan dalam kehidupan sehari-hari tetapi juga bagaimana cara untuk aktivitas lokal dapat mempengaruhi

masyarakat tingkat global (Ife, 2014:378). Menghubungkan antara tingkat global dapat mempengaruhi tingkat lokal atau sebaliknya, bagaimana tingkat lokal berpengaruh terhadap kehidupan global menjadi tantangan besar bagi pengembangan masyarakat.

Pariwisata budaya sebagai sebuah daya tarik wisata menurut Damanik (2013:109) harus mempunyai keunikan tempat atau lokasi yang dapat memberikan sebuah pengalaman yang berbeda, serta terciptanya citra menarik bagi tradisi, latar belakang etnik dan lanskap destinasi. Setiap broduk budaya mempunyai potensi untuk dikemas sesuai kebutuhan pengembangan pariwisata budaya dan juga memiliki nilai keunggulan kompetitif dan berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi semata tetapi yang paling penting ialah terjaganya kelestarian lingkungan, keberlanjutan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi.

Beberapa pakar di bidang analisis dampak lingkungan dari aktivitas kepariwisataan seperti Alisister Matchieoson dan Geoffery Wall, yang dikutip dalam Sunaryo (2013:53 54) menguraikan bahwa prinsip dari model pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta adanya pengukuran kinerja pembangunan kepariwisataan dengan beberapa aspek indikator penting:

1. Aspek indikator lingkungan fisik yang memerlukan pengamatan dan pengukuran secara periodik ada dua yaitu pertama yang bersifat fixed terdiri atas sumberdaya alam atau ekologi bukan buatan manusia seperti: hutan, danau, ketersediaan air tanah, polusi udara, terumbu karang. Kedua yang bersifat flexible berupa buatan manusia, contohnya: sistem infrastruktur, transportasi dan lainnya.
2. Aspek indikator sosial budaya yang harus selalu dimonitor kondisi dan kapasitasnya ialah (a) jumlah wisatawan dan tipe kegiatan rekreasi, serta perilaku wisatawan yang terserap oleh destinasi tanpa harus mengetahui identitas, gaya hidup dan kehidupan sosial budaya. (b) pelibatan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata. (c) memberikan kontribusi terhadap konservasi sumber daya alam dan cultural heritage. (d) memberikan nilai kepada wisatawan terhadap hubugannya dengan masyarakat lokal, kearifan lokal, isu-isu sosial dan lingkungan setempat. (e) meminimalkan

dampak negatif ekonomi, lingkungan, budaya dan sosial dengan pengembangan pariwisata. (f) menumbuhkan hubungan baik antara wisatawan dengan masyarakat sekitar destinasi.

